

## Keterkaitan antara Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Status Gizi Balita di Indonesia

Oleh Yuliana<sup>\*)</sup>

*Abstrak: Rendahnya pertumbuhan ekonomi akibat krisis ekonomi yang terjadi menyebabkan meningkatnya insiden kemiskinan di negara ini. Peningkatan insiden kemiskinan sangat mungkin berlangsung melalui kenaikan harga-harga (khususnya komoditi makanan) karena depresiasi rupiah yang drastis, kontraksi sektor formal yang kemudian berakibat pada menjamurnya kebangkrutan usaha-usaha ekonomi, meningkatnya pengangguran terbuka dan memburuknya prospek pasar kerja di sektor informal perkotaan, melemahnya permintaan barang dan jasa, serta penurunan drastis produksi pertanian. Kesemuanya itu pada gilirannya berakibat pada penurunan tingkat pendapatan dan daya beli sebagian besar penduduk, khususnya kelompok dengan pendapatan rendah, baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Rendahnya daya beli masyarakat terhadap makanan menyebabkan semakin besarnya masalah gizi (gizi buruk) khususnya pada anak usia bawah lima tahun (balita).*

**Kata kunci:** *Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Status Gizi, Balita.*

### 1. Pendahuluan

#### 1.1 Latar Belakang

Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997/1998, bersamaan dengan kekeringan panjang, telah berpengaruh negatif terhadap kondisi makro/mikro ekonomi. Pengaruh negatif terhadap ekonomi Indonesia terlihat dari: pertumbuhan ekonomi yang rendah,

yaitu 7,82% pada tahun 1996 menjadi 4,70% pada tahun 1997 dan semakin turun menjadi -13,13% pada tahun 1998 (BPS, 2002 dalam Julianery, 2002a); bunga bank tinggi, yaitu 18% pada awal tahun 1997 menjadi 51,67% tahun 1998 dalam bentuk suku bunga deposito berjangka satu bulan pada bank umum (Julianery, 2002b); nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika

<sup>\*)</sup> Yuliana, S.P., M.Si. adalah dosen Jurusan IKK Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang dan Mahasiswa S3 Pascasarjana IPB

menjadi rendah, yaitu dari 2.383 pada tahun 1996 menjadi 8.205 pada tahun 1998 (Julianery, 2002c); dan inflasi tinggi, yaitu 6,47% pada tahun 1996 menjadi 77,63% pada tahun 1998 (Julianery, 2002d).

Kondisi perekonomian Indonesia tersebut berdampak lebih lanjut pada tingginya biaya produksi dan sektor riil tidak berjalan seperti biasanya sehingga mengakibatkan banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan dan terpaksa tutup dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya. Menurut Saifullah (2002), PHK yang melanda berbagai sektor perbankan, jasa, dan industri mengakibatkan tingkat pengangguran meningkat pesat mencapai 40 juta orang dan tingkat kemiskinan naik 66% dari 22,5 juta jiwa pada tahun 1996 menjadi 37,5 juta pada tahun 1999. Dampak yang terasa bagi masyarakat miskin (yang berpendapatan rendah) adalah mengenai kelanjutan pemenuhan konsumsi pangan karena daya beli mereka semakin rendah. Hal ini semakin diperparah dengan meningkatnya harga keperluan rumah tangga lainnya seperti listrik dan minyak tanah yang mendorong meningkatnya harga-harga bahan makanan sehingga semakin memperlemah

ketahanan pangan keluarga dan pada akhirnya menimbulkan peningkatan jumlah anak yang mengalami gizi buruk.

## **1.2 Permasalahan**

Menurut Jahari dan Sumarmo (2002), sampai akhir 1999 telah tercatat sekitar 24.000 anak balita gizi buruk tingkat berat di Pusat Krisis Departemen Kesehatan dan pada tahun 2003 diperkirakan sebanyak 2,4 juta anak balita menderita gizi buruk. Berdasarkan hasil survei nasional dalam Hardinsyah (2005) terdapat beberapa propinsi dengan persentase masalah gizi buruk lebih dari 10,0%, yaitu Gorontalo (21,5%), Papua (14,3%), Kalimantan Barat (13,3%), Nusa Tenggara Timur (12,5%), Sumatera Utara (12,4%), Nusa Tenggara Barat (10,4%), Sumatera Selatan (10,2%), dan Sulawesi Selatan (10,1%).

Isu-isu kualitatif dari munculnya masalah busung lapar di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur akhir-akhir ini antara lain adalah terbatasnya peluang usaha/kerja sehingga pendapatan tidak memadai. Kondisi ini menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat miskin terhadap makanan dan akses pelayanan kesehatan yang berakibat rendahnya ketersediaan pangan keluarga.

Disamping itu, dana bagi keluarga miskin (kompensasi BBM) terlambat turun dan jumlah yang diperoleh belum bisa menyelesaikan masalah.

### 1.3 Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kemiskinan di Indonesia serta untuk mempelajari keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan keadaan (status) gizi balita.

## 2. Kajian Literatur dan Bahasan

### 2.1 Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Pertumbuhan ekonomi dalam pengertian ekonomi makro adalah penambahan produk domestik bruto (PDB)/*gross domestic product* (GDP) atau *gross national product* (GNP), yang berarti peningkatan pendapatan nasional (Julianery, 2002a; Dornbusch dan Fischer, 1996). Pertumbuhan ekonomi diukur sebagai persentase peningkatan GDP atau GNP selama satu tahun. Laju pertumbuhan perekonomian menunjukkan tingkat kenaikan GNP riil yang ditentukan oleh perubahan jumlah sumberdaya yang tersedia, perubahan tingkat penggunaan sumberdaya tertentu yang tersedia untuk produksi, dan perubahan

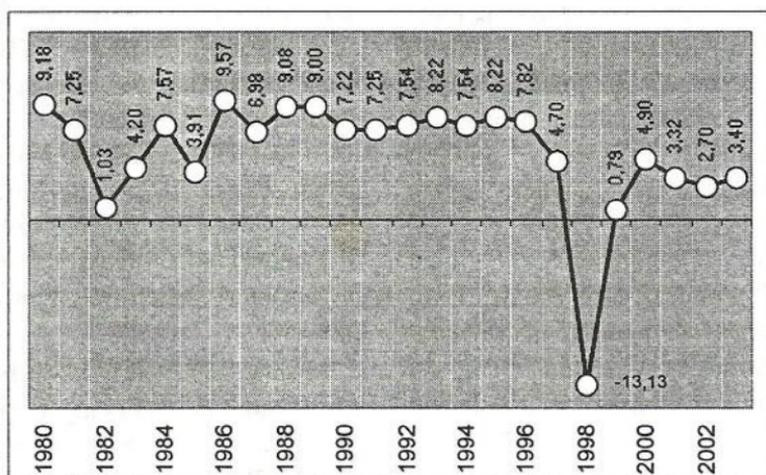
efisiensi kerja faktor produksi (Dornbusch dan Fischer, 1996).

Kondisi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 1980 sampai 2003 dapat dilihat pada Gambar 1. Dari tahun 1980 sampai tahun 1982, laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan *trend* yang menurun (resesi), kemudian secara berangsur-angsur kembali menunjukkan peningkatan (pemulihan) sampai tahun 1985. Sejak tahun 1986 sampai akhir tahun 1996 keadaan rupiah stabil dengan depresiasi antara tiga dan empat persen. Kondisi nilai tukar yang relatif stabil ini membawa pertumbuhan ekonomi negeri ini berkisar antara tujuh dan delapan persen per tahun. Memasuki tahun 1997 dan sampai akhir 1997 keadaan rupiah terus bergolak, sebentar naik dan tak lama kemudian turun lagi. Nilai rupiah yang tidak dapat dikendalikan itu menyulitkan seluruh aktivitas ekonomi dan hampir seluruh sektor usaha kecuali jasa mengalami penurunan. Keadaan ini mengakibatkan penurunan laju pertumbuhan ekonomi menjadi 4,70%.

Indonesia memasuki tahun 1998 dalam kondisi ekonomi yang sulit dan inflasi yang melambung menjadi 11,05%. Pergantian kepala pemerintahan dari Suharto ke B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998 tidak cukup

kuat menahan jatuhnya rupiah. Di tahun tersebut rupiah mengalami depresiasi hampir 80% dan inflasi melonjak menjadi 77,63%. Kondisi ini mengakibatkan hampir seluruh kegiatan ekonomi terhenti dan laju pertumbuhan ekonomi berada dalam keterpurukan (-13,13%). Salah satu sektor produksi yang mengalami kemerosotan paling dalam adalah industri pengolahan, yang sebelumnya dijadikan andalan ekspor nonmigas yang memiliki laju pertumbuhan per tahun sedikitnya 10%. Penyebab merosotnya industri pengolahan adalah rendahnya kemampuan belanja masyarakat dan kegiatan ekonomi yang lesu yang akhirnya mengakibatkan permintaan terhadap hasil produk ini berkurang.

Disamping itu tingginya suku bunga pinjaman, dana kredit dari perbankan nasional yang terbatas, dan harga bahan baku impor yang melonjak tinggi akibat dari rendahnya nilai rupiah serta penolakan bank-bank luar negeri terhadap surat pemberitahuan kredit dari bank nasional menghambat kegiatan industri (Julianery, 2002a). Pada akhirnya banyak perusahaan yang harus tutup usaha dan mengakibatkan tingginya angka pemutusan hubungan kerja. Kondisi ini mengakibatkan sebagian besar masyarakat kehilangan pekerjaan dan pendapatan serta secara langsung meningkatkan jumlah penduduk miskin yang tidak mampu menjangkau kebutuhan pokoknya.



Sumber : BPS 2002 dan Kompas Maret 2003

**Gambar 1: Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (%) 1980-2003**

Memasuki tahun 1999, negara-negara tetangga sudah dapat kembali mencapai laju pertumbuhan ekonomi mendekati sebelum krisis, namun Indonesia masih merasakan krisis berlanjut. Hal ini terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baru mencapai 0,79%. Menurut para ekonom, penyebabnya adalah rapuhnya fondasi ekonomi dan munculnya krisis politik dan sosial yang dapat mengganggu perekonomian Indonesia (Julianery, 2002c). Pada tahun 2000, kegiatan perekonomian mulai bergerak lebih cepat sehingga meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi menjadi 4,90%. Namun pada tahun 2001, angka pertumbuhan ekonomi tersebut turun menjadi 3,32% dan pada tahun 2003 pertumbuhan ekonomi sekitar 3,4%.

Untuk dapat mencapai peningkatan laju pertumbuhan ekonomi (5-6%), Daniel Lian dalam Kompas (2003a), Vice President Morgan Stanley merangkap *Chief Economist* untuk kawasan Asia Tenggara mengemukakan bahwa Indonesia perlu segera membangun paradigma baru dengan melakukan 6 hal penting, yaitu: 1) mengenali kekuatan sektor usaha kecil dan menengah (UKM), serta mengembangkan strategi dua arah, dengan menarik investasi asing langsung (*foreign direct investment/*

FDI), tanpa melupakan UKM, sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Thailand; 2) merangsang investasi domestik dalam rangka meningkatkan permintaan domestik, karena konsumsi swasta tidak bisa diharapkan akan tetap tinggi untuk jangka panjang; 3) infrastruktur domestik harus dibangun secara utuh untuk memulai dan mendukung investasi swasta domestik; 4) membangun hubungan saling melengkapi dengan Cina, dengan struktur upah yang rendah dan sumber daya alam (SDA) melimpah merupakan posisi yang baik untuk melakukan ini. Indonesia bisa mengembangkan kegiatan produksi teknologi rendah yang di Cina tidak lagi ekonomis karena upah yang mulai meningkat. Sementara dari sisi SDA, Indonesia bisa membangun bisnis SDA-nya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan industri di Cina; 5) meningkatkan ekspor tenaga kerja secara agresif dan proaktif mengingat populasi Indonesia jauh lebih besar dari Thailand dan Filipina yang lebih agresif mengeksport tenaga kerjanya, disamping itu tingginya tingkat pengangguran di Indonesia, strategi ini merupakan solusi; 6) perlu merangkul Singapura dan bukan menjauhinya.

Lebih lanjut Daniel Lian (Kompas, 2003a) mengemukakan bahwa gejolak politik dan kerusakan yang terjadi di Indonesia tidak lagi menjadi tujuan menarik bagi FDI, karena tingginya tingkat resiko, lebih-lebih lagi dengan kasus bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002. Upaya mengundang kembali para investor asing membutuhkan waktu yang lama, meskipun disertai stabilitas makro dan pemecahan terhadap resiko geopolitik dan keamanan. Oleh sebab itu, Singapura bisa menjadi investor besar bagi Indonesia sebagaimana sebelum tahun 1998.

## **2.2 Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan**

Kondisi pertumbuhan ekonomi yang menurun (resesi) merupakan salah satu penyebab kemiskinan. Keterpurukan pertumbuhan ekonomi pada tahun 1998 ("13,13%) telah memperburuk insiden kemiskinan (naik sebesar 66%) melalui mekanisme kenaikan drastis harga-harga kebutuhan pokok dan komoditi lainnya karena depresiasi nilai rupiah yang sangat cepat. Kenaikan harga barang-barang, khususnya barang input produksi impor, telah menyebabkan kontraksi sektor-sektor riil dan sektor formal secara umum. Situasi ini diikuti

oleh menjamurnya kebangkrutan dan kegagalan usaha-usaha ekonomi, khususnya yang sangat tergantung pada sumber-sumber dan komponen-komponen dari luar negeri. Sebagai akibatnya, tingkat pengangguran cenderung meningkat dan memburuknya prospek pasar kerja di sektor informal, melemahnya permintaan untuk barang dan jasa serta penurunan drastis produksi pertanian (Irawan dan Romdiati, 2000). Kesemuanya itu berdampak pada penurunan tingkat pendapatan dan daya beli dari sebagian besar penduduk, khususnya kelompok pendapatan rendah baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Memahami dampak pertumbuhan ekonomi yang menurun (ambuk) ini terhadap memburuknya angka kemiskinan merupakan suatu konsekuensi logis.

Irawan dan Romdiati (2000) mengemukakan bahwa kenaikan jumlah penduduk miskin pada akhir tahun 1998 dicirikan oleh suatu fenomena kemiskinan yang bersifat temporer/semantara dan jangka pendek (*transient poverty*) yang sangat berbeda dengan kemiskinan yang bersifat kronis (*chronics poverty*) dan struktural. Penduduk yang tergolong miskin sementara biasanya rentan pada saat krisis,

namun segera pulih kembali saat krisis berlalu, sedangkan yang tergolong miskin kronis yaitu yang tidak mampu membeli pangan pada harga pasar dalam kondisi yang normal sekalipun. Untuk Indonesia yang saat ini pertumbuhan ekonominya masih belum normal, keberadaan kelompok miskin kronis masih akan tetap besar (Saifullah, 2002). Data dari beberapa daerah memperkuat pendapat tersebut seperti di Jawa Barat sekitar 16 juta penduduk tergolong miskin (Pikiran Rakyat, 2002) dan di Kalimantan Tengah sekitar 30% penduduknya hidup dibawah garis kemiskinan (Media Indonesia, 2002a).

Dalam upaya menanggulangi kemiskinan, pemerintah telah menetapkan tiga langkah, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan infrastruktur, dan memajukan sumberdaya manusia. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, (waktu itu Jusuf Kalla) mengatakan bahwa upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7% antara lain dilakukan dengan pemberian kredit untuk UKM sebesar Rp 3,0 triliun pada tahun 2002. Selain itu memantapkan perekonomian makro dan mikro dalam negeri untuk membuka lapangan kerja dalam jumlah besar guna mengurangi angka

pengangguran (Media Indonesia, 2002b).

### 2.3 Kaitan Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Status Gizi Balita

Adanya dampak laju pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi saling terkait dengan kemiskinan. Bila laju pertumbuhan ekonomi tinggi dan produksi barang dan jasa meningkat, tingkat pengangguran berkurang karena tersedianya lapangan kerja dan pada akhirnya jumlah penduduk miskin berkurang. Sebaliknya, krisis ekonomi yang berdampak terhadap penurunan laju pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan timbulnya pemutusan hubungan kerja hingga memperbesar tingkat pengangguran dan pada akhirnya akan meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Biro Pusat Statistik/BPS dan United Nations Development Programme/UNDP (1999) membuat suatu kerangka hubungan timbal balik (keterkaitan) antara pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pembangunan manusia (status gizi) (Gambar 2). Pada arah hubungan dari bawah ke atas, keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan status gizi dapat ditinjau dari dua proses

pengaruh, sehingga penanganannya melalui dua pengaruh tersebut. Proses pertama menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi diharapkan akan menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan, sehingga akan mengurangi insiden kemiskinan. Perbaikan ini kemudian akan berpengaruh positif terhadap tingkat dan pola pengeluaran konsumsi rumah tangga, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan investasi pada pembangunan manusia, seperti perbaikan status gizi, kesehatan dan pendidikan. Proses kedua menerangkan bahwa pertumbuhan ekonomi juga diharapkan dapat meningkatkan anggaran pemerintah untuk memberikan bantuan kepada golongan bawah seperti melalui program-program jaring pengaman sosial (JPS) dan peningkatan kesejahteraan penduduk, terutama juga yang berkaitan dengan pengembangan sumberdaya manusia. Sementara itu pada arah hubungan dari atas ke bawah mengindikasikan bahwa meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dengan status gizi, kesehatan, dan pendidikan yang baik juga dipercaya akan merangsang peningkatan kesempatan kerja yang produktif, yang pada gilirannya akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi selanjutnya.

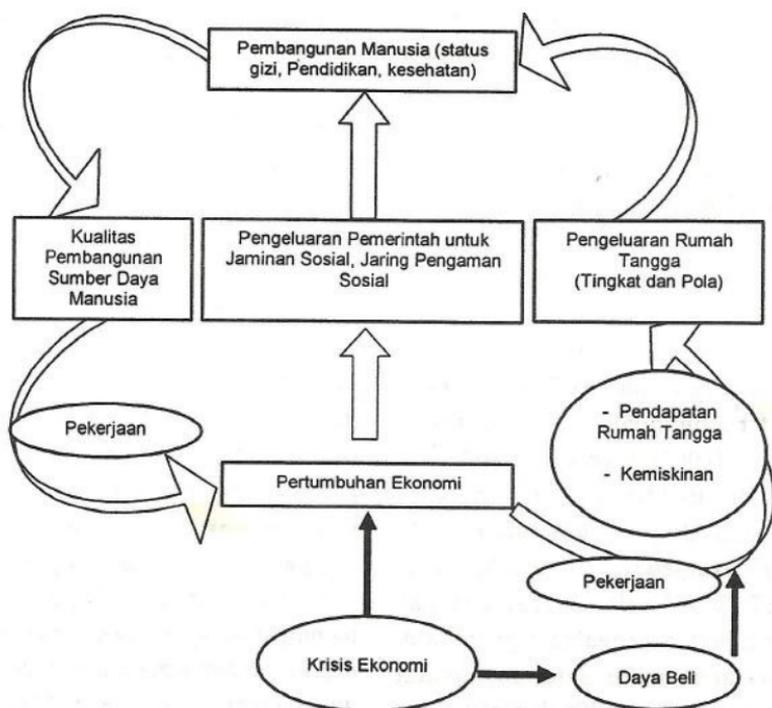
Irawan dan Romdiati (2000) membuktikan adanya keterkaitan antara laju pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan tersebut. Selama periode pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi (sebelum krisis ekonomi), jumlah penduduk miskin di Indonesia menurun dengan pesat dari sekitar 54,2 juta orang (40,1% terhadap total penduduk) pada tahun 1976 menjadi 22,5 juta orang (11,3%) pada tahun 1996. Akan tetapi, dengan adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan 1997, bersamaan dengan meningkatnya harga-harga dan penurunan rata-rata pendapatan karena dampak krisis, laju pertumbuhan ekonomi menurun drastis menjadi -13,13% pada tahun 1998 dibandingkan 7,82% pada tahun 1996. Jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 49,5 juta orang (24,23%) pada Desember 1998, atau suatu kenaikan absolut sebesar 27 juta orang dibandingkan dengan kondisi tahun 1996 (22,5 juta orang).

Meningkatnya jumlah penduduk miskin yang melalui beberapa mekanisme yang telah diuraikan diatas menyebabkan penurunan drastis pada pendapatan daya beli mereka. Menurunnya pendapatan secara negatif berdampak pada kuantitas dan pola konsumsi rumah tangga. Dengan tingkat pendapatan

pengaruh, sehingga penanganannya melalui dua pengaruh tersebut. Proses pertama menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi diharapkan akan menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan, sehingga akan mengurangi insiden kemiskinan. Perbaikan ini kemudian akan berpengaruh positif terhadap tingkat dan pola pengeluaran konsumsi rumah tangga, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan investasi pada pembangunan manusia, seperti perbaikan status gizi, kesehatan dan pendidikan. Proses kedua menerangkan bahwa pertumbuhan ekonomi juga diharapkan dapat meningkatkan anggaran pemerintah untuk memberikan bantuan kepada golongan bawah seperti melalui program-program jaring pengaman sosial (JPS) dan peningkatan kesejahteraan penduduk, terutama juga yang berkaitan dengan pengembangan sumberdaya manusia. Sementara itu pada arah hubungan dari atas ke bawah mengindikasikan bahwa meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dengan status gizi, kesehatan, dan pendidikan yang baik juga dipercaya akan merangsang peningkatan kesempatan kerja yang produktif, yang pada gilirannya akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi selanjutnya.

Irawan dan Romdiati (2000) membuktikan adanya keterkaitan antara laju pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan tersebut. Selama periode pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi (sebelum krisis ekonomi), jumlah penduduk miskin di Indonesia menurun dengan pesat dari sekitar 54,2 juta orang (40,1% terhadap total penduduk) pada tahun 1976 menjadi 22,5 juta orang (11,3%) pada tahun 1996. Akan tetapi, dengan adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan 1997, bersamaan dengan meningkatnya harga-harga dan penurunan rata-rata pendapatan karena dampak krisis, laju pertumbuhan ekonomi menurun drastis menjadi -13,13% pada tahun 1998 dibandingkan 7,82% pada tahun 1996. Jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 49,5 juta orang (24,23%) pada Desember 1998, atau suatu kenaikan absolut sebesar 27 juta orang dibandingkan dengan kondisi tahun 1996 (22,5 juta orang).

Meningkatnya jumlah penduduk miskin yang melalui beberapa mekanisme yang telah diuraikan diatas menyebabkan penurunan drastis pada pendapatan daya beli mereka. Menurunnya pendapatan secara negatif berdampak pada kuantitas dan pola konsumsi rumah tangga. Dengan tingkat pendapatan



**Gambar 2: Keterkaitan antara Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Status Gizi (BPS dan UNDP, 1999)**

yang sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa mengubah pola makanan pokoknya ke barang paling kurang dengan jumlah yang berkurang. Sementara di beberapa kasus, seperti yang ditemukan oleh Irawan (1998), penurunan tajam pada pendapatan telah menyebabkan banyak rumah tangga mengalami kekurangan konsumsi makanan karena mereka mengalami kesulitan

untuk membelinya. Pada studi lainnya, Irawan (1999) juga menemukan bahwa mayoritas penduduk yang miskin cenderung mengubah pola konsumsi makanan, baik kualitas maupun kuantitas, seperti dari nasi ke jagung atau umbi-umbian, dan dari sebanyak 3 kali ke 1 atau 2 kali makan sehari. Kekurangan konsumsi makanan berdampak negatif terhadap keadaan (status gizi) masyarakat dan

balita (bayi dan anak bawah lima tahun) yang merupakan kelompok yang paling rentan dengan kondisi tersebut.

Jahari *et al.* (2000) mengemukakan bahwa masalah gizi buruk pada balita di Indonesia mengalami peningkatan (menjadi 10,1%) pada saat pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sampai -13,13% (1998) dibanding tahun 1989 (6,3%) pada saat pertumbuhan ekonomi tinggi sampai 9,00%. Kasus gizi buruk yang tercatat di klinik Puslitbang Gizi Depkes Bogor pada tahun 1998 meningkat sebesar 30-40% dari tahun 1997. Di wilayah utara Jawa Tengah peningkatan prevalensi gizi buruk pada anak umur 3 tahun tercatat sekitar 8% tahun 1996 dan meningkat menjadi 12-15% pada tahun 1998 (<http://www.republika.co.id/9810/13/475.htm>).

Beberapa upaya untuk mengatasi kemiskinan dan menurunkan prevalensi gizi buruk sudah dilakukan, namun bukan berarti masalah gizi buruk sudah tidak ada. Beberapa data menunjukkan bahwa prevalensi balita gizi buruk di Indonesia adalah sekitar 8,1% (Jahari dan Sumarno, 2002). Sebanyak 19.978 orang warga Sleman Yogyakarta bergizi buruk (7.683 orang diantaranya adalah balita) (Media Indonesia, 2002b), sekitar 61.500

orang balita di Jawa Barat berstatus gizi buruk (Pikiran Rakyat, 2002), dan sebanyak 30.000 anak balita di Sumatera Barat menderita gizi buruk (Kompas 2003b).

Adanya keterkaitan pertumbuhan ekonomi dan status gizi juga dikemukakan oleh Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan (Soekirman, 2000). Dalam salah satu pidatonya dikatakan bahwa "Gizi yang baik dapat mengubah kehidupan anak, meningkatkan pertumbuhan fisik dan perkembangan mental, melindungi kesehatannya, dan meletakkan pondasi untuk masa depan produktivitas anak sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara". Pernyataan ini memperkuat hasil riset para pakar gizi dan kesehatan mengenai adanya kaitan antara pangan, gizi, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi.

### **3. Simpulan dan Saran**

#### **3.1 Simpulan**

Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi berdampak terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin melalui beberapa mekanisme, seperti produksi barang dan jasa meningkat, tingkat pengangguran berkurang karena tersedianya lapangan kerja, pendapatan keluarga meningkat sehingga daya beli terhadap makanan

dan kesehatan meningkat yang mendorong pemenuhan konsumsi pangan keluarga dan pada akhirnya menurunkan masalah gizi (gizi buruk pada balita). Sebaliknya, krisis ekonomi yang berdampak terhadap penurunan laju pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan timbulnya pemutusan hubungan kerja hingga memperbesar tingkat pengangguran dan pada akhirnya akan meningkatkan jumlah penduduk miskin, menurunkan pendapatan keluarga dan penurunan daya beli terhadap makanan dan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya konsumsi makanan keluarga dan pada akhirnya meningkatkan masalah gizi (gizi buruk pada balita).

### 3.2 Saran

Masalah gizi merupakan dampak dari kemiskinan, namun tidak selalu pemecahan masalah gizi harus dimulai dengan mengatasi kemiskinan dan menunggu peningkatan laju per-

tumbuhan ekonomi. Terhadap masalah gizi yang mendesak harus dilakukan (misal: gizi buruk pada balita), pemberian makanan tambahan pada balita (salah satu program JPS) dalam upaya pemenuhan konsumsi makanan sangat tepat dilakukan terlebih dahulu, disamping melakukan upaya peningkatan pendapatan masyarakat (penurunan jumlah penduduk miskin) melalui penyediaan lapangan kerja dan kebijakan makro ekonomi (harga, inflasi dan suku bunga). Peran Pemerintah Pusat yang didukung oleh Pemerintah Kota/Kabupaten serta LSM sangat diharapkan untuk memperkuat program-program pengentasan kemiskinan yang terintegrasi dengan perbaikan gizi (contohnya keberlanjutan program JPS dan penyediaan lapangan kerja). Disamping itu, kepedulian masyarakat terhadap status gizi anak balita dengan cara memperkuat asuhan anak dalam keluarga mutlak diperlukan.

### Pustaka Acuan

- Biro Pusat Statistik dan United Nation Development Programme (1999). *Crisis, Poverty and Human Development in Indonesia 1999*. Jakarta: BPS-UNDP.
- Dornbusch, R. dan Fischer, S. 1996. *Makroekonomi*. (Alih bahasa: J.A. Mulyadi). Jakarta: Erlangga.
- <http://www.republika.co.id/9810/13/htm>. *Akibat Rawan Pangan Penderita Kurang Gizi pada bayi dan Ibu Hamil Meningkat*.

- Hardinsyah. 2005. *Masalah Gizi Buruk, Penyebab dan Dampaknya*. Makalah dalam Semiloka Nasional: Memerangi Gizi Buruk dari Perspektif Gender. Bogor: Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat. IPB.
- Irawan, P.B. dan Romdiati, H. 2000. *Dampak Krisis Ekonomi terhadap Kemiskinan dan Beberapa Implikasinya untuk Strategi Pembangunan*. Jakarta: Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VII. LIPI.
- Irawan, P.B. 1998. *Analisis Studi Data Kualitatif: Hasil Survei Dampak Krisis Terhadap Ketahanan Ekonomi Rumah tangga di Pedesaan*. Jakarta: BPS-UNDP.
- Irawan, P.B. 1999. *Analisis Perkembangan dan Dimensi Kemiskinan*. Jakarta: BPS-UNDP.
- Jahari, A.B. dan Sumarno. 2002. *Status Gizi Penduduk Indonesia*. Artikel dalam Majalah Pangan, Media Komunikasi dan Informasi. Jakarta: Puslitbang Bulog.
- Jahari, A.B., Sandjaja, S.H., Soekirman, I.J., Jalal, F., Latief, D., dan Atmarita. 2000. *Status Gizi Balita di Indonesia Sebelum dan Selama Krisis*. Jakarta: Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VII. LIPI.
- Julianery, B.E. 2002a. *Produk Domestik Bruto*. Makalah dalam Indonesia dalam Krisis 1997–2002. Jakarta: Kompas.
- Julianery, B.E. 2002b. *Suku Bunga Simpanan Berjangka: Menghimpun Dana dengan Iming-iming Bunga*. Makalah dalam Indonesia dalam Krisis 1997–2002. Jakarta: Kompas.
- Julianery, B.E. 2002c. *Rupiah Jatuh Bebas*. Makalah dalam Indonesia dalam Krisis 1997–2002. Jakarta: Kompas.
- Julianery, B.E. 2002d. *Inflasi: Harga melangit*. Makalah dalam Indonesia dalam Krisis 1997–2002. Jakarta: Kompas.
- Kompas. 2003a. *Enam Syarat untuk Pertumbuhan 5-6 Persen*. Edisi 5 Februari 2003, Jakarta.
- Kompas. 2003b. *Kenaikan Harga Bahan Pokok Perparah Kondisi Balita Gizi Buruk*. Edisi 18 Januari 2003, Jakarta.
- Media Indonesia. 2002a. *30% Penduduk Kalteng Hidup di Bawah Garis Kemiskinan*. Edisi 7 November 2002, Palangkaraya (<http://www.mediaindonesia.co.id/0211/07.htm>).
- Media Indonesia. 2002b. *Sebanyak 19.978 Orang Warga Sleman Bergizi Buruk*. Edisi 26 September 2002, Yogyakarta (<http://www.mediaindonesia.co.id/0209/26.htm>).

- Pikiran Rakyat. 2002. *16 Juta Penduduk Jabar Miskin*. Edisi 31 Desember 2002 (<http://www.pikiranrakyat.co.id/0212/31.htm>).
- Saifullah, A. 2002. *Badan Penyangga Kebijakan Pasar Hasil-Hasil Pertanian dalam Usaha Menciptakan Ketahanan Pangan*. Artikel dalam *Majalah Pangan, Media Komunikasi dan Informasi*. Jakarta: Puslitbang Bulog.
- Soekirman. 2000. *Ilmu Gizi dan Aplikasinya*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan Nasional.